VOL. 02, NO. 02, 2025
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PT. VALE DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GERESA KABUPATEN MOROWALI

Indra Gumilang[1)]*, Subhan Haris[2)], Richard F. Labiro[3)]

[1]**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
iindragumilang@gmail.com
[2] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
subhanharis71@gmail.com
[3] **Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
labirorichard@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Vale Indonesia, Tbk., dalam Pembangunan di Desa Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengunakan deskkriptif kualitatif dengan tipe penelitian deskribtif. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan teori yang di kemukakan oleh George R. Terry dan Leslie W. Rue (2019) dengan 5 indikator manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan SDM, motivasi dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana PPM masih belum optimal dalam perencanaan, musyawarah desa telah dilakukan, tetapi transparansi dan keterlibatan masyarakat masih kurang dalam pengelolaan. Kendala utama dalam implementasi adalah minimnya partisipasi aktif masyarakat serta kurangnya realisasi masukan yang diusulkan masyarakat. Dari aspek pengorganisasian, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menghadapi kendala koordinasi, efisiensi waktu, serta faktor eksternal seperti cuaca dan keterbatasan kemampuan pada teknologi. Pemilihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa, tetapi tantangan transparansi dalam pengelolaan dana masih ada. Dari segi motivasi, sistem pembayaran dan insentif telah diterapkan, dalam pengawasan, pemantauan dilakukan oleh pemerintah desa dan PT Vale, tetapi keterlibatan masyarakat dalam audit masih rendah. Secara keseluruhan, tantangan utama dalam pengelolaan dana PPM adalah transparansi, keterlibatan masyarakat, dan efektivitas program. Perbaikan dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan diperlukan agar dana PPM memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Kata kunci: Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan SDM, Motivasi, Pengawasan

VOL. 02, NO. 02, 2025
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

Management of PT Vale Indonesia Tbk's Community Development and Empowerment (PPM) funds in Development in Geresa Village, East Bungku District, Morowali Regency. This research was carried out using qualitative descriptive with a descriptive research type. The types of data are primary data and secondary data, this study uses the theory put forward by George R. Terry and Leslie W. Rue (2019) 5 management indicators, namely planning, organizing, staffing, motivation, and supervision. The results of the study show that the management of PPM funds is still not optimal in planning, village deliberations have been carried out, but transparency and community involvement are still lacking in management. The main obstacles in implementation are the lack of active community participation and the lack of realization of the input proposed by the community. From the organizational aspect, the Activity Management Team (TPK) faces coordination constraints, time efficiency, as well as external factors such as weather and limited technology capabilities. The selection of the Activity Management Team (TPK) is carried out through village deliberations and determined by the Decree of the Village Head, but the challenge of transparency in fund management still exists. In terms of motivation, payment systems and incentives have been implemented, in supervision, monitoring is carried out by the village government and PT Vale, but community involvement in the audit is still low. Overall, the main challenges in managing PPM funds are transparency, community engagement, and program effectiveness. Improvements in planning, coordination, and supervision are needed so that PPM funds provide maximum benefits to the village community.

Keyword: Planning, Organization, Staffing, Motivating, Controlling

Submisi: 28-05-2025
Diterima: 29-05-2025
Dipublikasikan: 05-05-2025

VOL. 02, NO. 02, 2025
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakt sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Program PPM sendiri telah di atur dalam PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Program PPM sendiri diatur secara khusus oleh kepmen esdm nomor 1824 k/30/mem/2018. Program PPM disusun dalam Rencana Induk PPM dan penyusunannya berpedoman dengan dokumen cetak biru (blue print) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambagan Mineral Dan Batu Bara. Berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya program PPM merupakan program terencana dan terukur dan yang mempunyai konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti program pendidikan, kesehatan program kemandirian ekonomi, program pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang.

Desa Geresa Kecamatan Bungku Timur merupakan salah satu daerah di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai salah satu tempat beroperasinya perusahaan tambang nikel. Perusahaan tambang nikel tersebut inilah yang kemudian dikenal dengan nama PT Vale Indonesia Tbk. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Kecamatan Bungku Timur, sudah sewajarnya apabila PT Vale Indonesia Tbk merasa turut bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Perusahaan tambang inilah yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Morowali dalam membantu program-program di wilayah Kontrak Karya untuk mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Namun demikian, jumlah dana program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang terjadi setiap tahun tersebut ternyata belum bisa menjamin terlaksananya kesejahteraan masyarakat di desa Geresa, serta dampak secara langsung ke masyarakat belum dirasakan secara merata dan nyata. Realita yang ada dilapangan bahwa hari ini dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT.Vale yang berjumlah 200 juta di berikan secara langsung ke desa kemudian dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pemerintah desa.

Peran pemerintah desa Geresa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sangat penting dalam mengatur dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan program PPM, memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang aktif dalam program PPM, dan menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan keterlibatan pemerintah, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dapat menjadi lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dana pada program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT.Vale di Desa Geresa sendiri masih dialihkan pada pembangunan infrastruktur desa yang hari ini (2024) hanya dialihkan ke pengembangan wisata mangrove, yang seharusnya dialokatakan dengan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat, termasuk program program pembangunan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa Geresa harus memperhatikan indikator kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan memanfaatkan dana, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan perkembangan masyarakat setempat.

Dana PPM tersebut seharusnya dipergunakan dengan baik dan tepat sasaran, maka dari itu

dibutuhkannya peran pemerintah desa yang efektif dalam pengelolaan PPM. Pentingnya peran pemerintah desa Geresa dalam pengelolaan dana PPM yang efektif dan efisien dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di desa Geresa untuk itu penelitian ini bertujuan bagaimana dana PPM PT.VALE indonesia Tbk di alokasikan, di atur dan dikelola oleh pemerintah desa Geresa untuk mendukung program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan apa dampak yang dihasilkan dalam pengelolaan dana bagi PPM masyarakat dan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus karena peneliti menganggap bahwa penelitian akan lebih mudah dijawab dengan studi kasus karena studi kasus adalah pengumpulan data yang bersifat integrative dan komprehensif. Integratif artinya menggunakan berbagai teknik pendekatan dan bersifat komprensif yaitu data yang dikumpulkan meliputi seluruh aspek pribadi individu secara lengkap.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah tipe pendekatan penelitian yang berusaha menentukan serta menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Teori dalam penelitian ini adalah menggunakan indikator fungsi -fungsi manajemen Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2019), terdiri dari 5 aspek yaitu, *Planning*, *Organizing*, *Staffing*, *Motivating*, *Controlling*. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi yang berasal dari tempat penelitian yang berupa referensi dan arsip atau laporan-laporan berkala yang berkaitan dengan objek peneliitian. Dan Data primer yaitu data yang secara langsung atau diperoleh secara langsung melalui wawancara secara langsung dengan informan di lapangan.

Data dan informasi dalam penelitian ini akan diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung objek penelitian dilapangan dengan tujuan melihat masalah-masalah yang akan diteliti, Wawancara yang dilakukan melalui tanya jawab langsung secara lisan dengan informan penelitian atau narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang di sediakan. Melalui wawancara ini menjaring data yang dibutuhkan agar dapat mempermudah penulisan, Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang bertujuan untuk memperkuat data yang dibutuhkan. Satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya. Analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu, *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Vale telah ada di Indonesia memulai eksplorasi di tahun 1920-an, dan pada Juli 1968, mereka mendirikan PT International Nickel Indonesia (INCO) sebagai entitas pertama. Saat itu, perjanjian dengan pemerintah dibuat dalam bentuk Kontrak Karya (KK). Bertahun-tahun sebelum pemerintah Indonesia memerintahkan hilirisasi mineral, PT Vale telah menjalankan pabrik pengolahan di Sorowako sejak 1977. Seiring perjalanannya, PT INCO berkembang menjadi

perusahaan tambang nikel terkemuka pada 2011, terjadi perubahan susunan pemegang saham yang berujung pada perubahan nama entitas kami menjadi PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale memegang teguh prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam melakukan aktivitas pertambangan.

Desa Geresa Kecamatan Bungku Timur merupakan salah satu daerah di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai salah satu tempat beroperasinya perusahaan tambang nikel. Perusahaan tambang nikel tersebut inilah yang kemudian dikenal dengan nama PT Vale Indonesia Tbk. Sebelum ada perusahaan beroperasi di wilayah bungku timur udara di wilayah bungku timur khususnya di desa geresa masih terbebas dengan polusi udara berbeda ketika perusahaan beroperasi udara di sekitar bungku timut salah satunya di desa geresa mulai mengalami dampak perubahan udara menjadi berpolusi di akibatkan dari beroperasi Perusahaan. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Kecamatan Bungku Timur, sudah sewajarnya apabila PT Vale Indonesia Tbk merasa turut bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Perusahaan tambang ini merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Morowali dalam membantu program-program di wilayah Kontrak Karya untuk mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Hadirnya PT Vale di Bungku Timur juga membawa dampak positif terhadap Pembangunan desa salah satunya di desa Geresa melalui program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT Vale yang dilaksanakan di Desa Geresa adalah mengacu pada hasil musyawarah desa, yang melibatkan baik pemerintah desa maupun masyarakat di dalamnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program Desa setiap tahun adalah sebesar 200 juta pertahun setiap Desa di area pemberdayaan perusahaan, salah satunya adalah Desa Geresa. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah desa, BPD dan Pihak PT Vale untuk memastikan penggunaan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, evaluasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dengan program yang dibiayai oleh APBDes. Secara keseluruhan, pengelolaan dana PPM berdasarkan prinsip musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas,

PT. Vale Indonesia, Tbk., (PT Vale) melalui *Indonesian Growth Project* (IGP) Morowali menegaskan komitmennya untuk menjalankan program keberlanjutan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program PPM tersebut di antaranya memuat komitmen dalam menjalankan program sosial, dan pengembangan talenta lokal agar dapat terserap dalam industri pertambangan salah satunya pada area operasional PT Vale. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sangat vital untuk memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pengelolaan dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dana yang dikelola secara efisien dan efektif. Dalam prakteknya, pengelolaan dana PPM memerlukan perhatian khusus terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara optimal.

Perencanaan yang di masksud sebagai tahap awal dalam pengelolaan dana PPM merupakan proses penting yang bertujuan untuk memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Tahap ini diawali dengan identifikasi masalah dan potensi desa melalui musyawarah bersama warga dan pemangku kepentingan. Hasil dari proses ini digunakan untuk menyusun prioritas pembangunan yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Selanjutnya, disusun rencana kerja dan anggaran secara terperinci dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan keterlibatan

seluruh pihak terkait. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengelolaan dana PPM yang transparan, efisien, dan akuntabel untuk mendukung keberhasilan program pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah mengutamakan musyawarah desa untuk merencanakan program pembangunan, termasuk penggunaan dana PPM, terdapat beberapa kekurangan dalam proses perencanaannya. Salah satu kekurangan utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana PPM dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, terutama dalam hal implementasi program. Meskipun musyawarah desa digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan dan alokasi dana, masih ada beberapa pihak yang merasa tidak dilibatkan secara maksimal. Selain itu, meskipun prinsip partisipatif diutamakan dalam perencanaan, ada indikasi bahwa masukan dari masyarakat sering kali tidak terealisasi. Beberapa masyarakat juga mengungkapkan bahwa kebutuhan yang telah disampaikan dalam musyawarah, seperti pembangunan pagar, belum sepenuhnya terakomodasi atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada proses musyawarah, masih ada masalah dalam implementasi dan transparansi pengelolaan dana PPM di Desa Geresa.

Pengorganisasian adalah proses mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi organizing dalam manajemen adalah langkah penting yang melibatkan pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab bagi individu-individu dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan semua sumber daya, termasuk manusia, modal finansial, mesin, dan waktu, untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pengorganisasian tidak hanya melibatkan pengaturan orang, tetapi juga pengelolaan semua aset yang dimiliki organisasi. Pengorganisasian dalam pengelolaan dana PPM yang dimaksud peneliti adalah proses penataan struktur, peran, dan mekanisme kerja yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan dana PPM dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaannya.

Dari hasil penelitian bahwa proses pengorganisasian program PPM di desa sudah cukup baik dalam melibatkan Masyarakat, meskipun masih ada pihak yang merasa belum dilibatkan secara optimal. Pengawasan dan pelaksanaan program dilakukan oleh TPK yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan progres pekerjaan, meskipun ada kendala dalam koordinasi dan pemahaman penggunaan teknologi (leptop) oleh anggota TPK. Meskipun dana program disalurkan melalui dua tahap, pengorganisasian masih menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan dan efisiensi waktu, terutama ketika kendala cuaca menghambat progres. Selain itu, pelaporan dan komunikasi yang baik antara TPK, pemerintah desa, dan PT Vale sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran program.

Staffing (penempatan SDM) merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Di dalam menyusun sebuah organisasi, perlu sekali pembagian tugas yang sebaik-baiknya dan memberi wewenang yang tepat, namun demikian yang lebih penting lagi ialah menempatkan orang secara tepat pada tempat-tempat sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan. Perlu disadari bahwa manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Staffing dalam pengelolaan dana PPM yang dimaksud peneliti adalah proses penempatan orang-orang yang tepat pada posisi yang sesuai berdasarkan kemampuan, keahlian, dan tanggung jawab mereka untuk memastikan pengelolaan dana berjalan efektif, efisien, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses *staffing* dalam pengelolaan dana PPM di desa sudah baik dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, untuk memilih Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK yang

terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan SK kepala desa. TPK bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana PPM, sementara pemerintah desa dan pihak PT. Vale berperan dalam pengawasan dan memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meskipun TPK mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, masalah transparansi dan ketidakadilan dalam pengelolaan masih menjadi kendala. Beberapa pihak, meskipun terlibat dalam pelaksanaan, merasa belum dilibatkan dalam perencanaan atau pengelolaan, terutama terkait dengan pengembangan fasilitas kesehatan atau sekolah di desa.

Motivating dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Soemanto (1987) secara umum mendefinisikan motivasi sebagai suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi- reaksi pencapaian tujuan. Karena kelakuan manusia itu selalu bertujuan, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan tenaga yang memberi kekuatan bagi tingkahlaku mencapai tujuan, telah terjadi di dalam diri seseorang. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah merupakan sejumlah proses-proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkanya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (volunter) yang diarahkan ke tujuan tertentu, baik yang bersifat internal, atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi. Motivating dalam pengelolaan dana PPM yang dimaksud peneliti adalah proses mendorong dan memberikan semangat kepada semua pihak yang terlibat agar berkomitmen dan aktif dalam mengelola dana secara optimal, sehingga tujuan program tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian bahwa proses Motivating dalam pengelolaan dana PPM di desa sudah baik Proses motivasi dalam pengelolaan dana PPM di desa melibatkan berbagai langkah untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah desa secara aktif melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi kepada pekerja untuk bekerja maksimal, dengan sistem pembayaran harian berdasarkan standar yang berlaku. Semua elemen masyarakat dilibatkan, termasuk pemuda dan tokoh masyarakat, dalam musyawarah desa dan perencanaan program PPM. Pemerintah desa memberi kepercayaan kepada TPK untuk mengelola material, mesin, dan operasional, termasuk dengan insentif khusus untuk TPK. Transparansi masih menjadi tantangan, tetapi pembangunan, seperti jalan tani, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat hasil pembangunan. Beberapa pihak merasa kurang dilibatkan dalam pengelolaan dana PPM, namun ada pula yang merasa didukung. Secara keseluruhan, motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan diupayakan melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi dengan pemerintah desa serta pengelola program.

Aspek *Controlling* atau pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dalam manajemen organisasi atau perusahaan, Elbadiansyah, H. (2023:82) pengawasan dianggap penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentu akan menghasilkan tujuan yang kurang baik, baik bagi organisasi baik pula bagi para pekerjanya. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan pekerjaan yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, dan pengawasan juga merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling dalam pengelolaan dana PPM yang dimaksud

peneliti adalah proses pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan dana dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Penelitian menunjukan bahwa proses controlling dalam pengelolaan dana PPM di desa sudah cukup baik ,ini menunjukkan upaya yang terstruktur dan berfokus pada pengawasan pekerjaan secara langsung, termasuk pemantauan material dan pekerjaannya. Pemerintah desa berusaha mengedukasi masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Vale dan TPK, dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan. Namun, meskipun ada pengawasan yang ketat terhadap pekerjaan, masih terdapat kekurangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait dengan pelaporan penggunaan dana PPM kepada masyarakat. Masyarakat belum dilibatkan dalam proses audit atau evaluasi, yang menjadi salah satu masalah utama. Selain itu, pemerintah desa belum terlibat dalam mengawasi kebutuhan yang diperlukan oleh sektor-sektor lain seperti sekolah dan tenaga kesehatan dalam program PPM. Hal ini menandakan bahwa meskipun pengelolaan dana PPM cukup terorganisir, masih ada ruang untuk perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah di paparkan dari bab sebelumnya, ditarik kesimpulan, yaitu Pengelolaan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT. Vale Indonesia, Tbk,. Dalam Pembangunan di Desa Geresa Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali masih belum maksimal yang dapat di lihat dari teori yang di kemukakan oleh George R. Terry dan Leslie W. Rue (2019), terdapat indikator-indikator yang di jadikan bahan dalam penelitian diantaranya *Planning, Organizing, Staffing, Motivating, Controlling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana PPM di desa belum berjalan secara maksimal. Meskipun musyawarah telah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan dan penggunaan dana, transparansi pengelolaan serta keterlibatan masyarakat masih menjadi kendala. Beberapa pihak merasa tidak dilibatkan secara optimal, dan aspirasi masyarakat sering kali tidak terealisasi, yang mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi serta transparansi dana PPM. Dari segi pengorganisasian, program PPM telah cukup baik dalam melibatkan masyarakat, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman penggunaan teknologi (leptop) oleh anggota TPK hal ini menyebabkan kurang efisiensi dalam pelaporan dan pembuatan dokumen tentang program PPM dan hambatan dalam penyaluran dana akibat faktor waktu serta cuaca. Komunikasi yang lebih baik antara TPK, pemerintah desa, dan PT Vale sangat diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif.

Proses penetapan SDM dalam pengelolaan dana PPM telah terlaksana dengan baik melalui musyawarah, dimana anggota TPK dipilih secara transparan dan mendapatkan pelatihan yang mendukung tugas mereka. Dalam aspek motivasi, upaya sosialisasi, pelibatan masyarakat, serta sistem insentif telah diterapkan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana. Pemerintah desa juga terus berupaya mendorong edukasi agar masyarakat lebih terlibat dalam mendukung pembangunan. Pengawasan terhadap dana PPM telah dilakukan secara terstruktur dengan evaluasi berkala, tetapi masih terdapat kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pelaporan dana serta keterlibatan masyarakat dalam proses audit dan evaluasi. Secara keseluruhan, meskipun beberapa aspek telah berjalan dengan baik, masih diperlukan peningkatan dalam transparansi, keterlibatan masyarakat, serta efektivitas implementasi dana PPM

agar program ini dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Elbadiansyah. 2023. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Deepublish.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambagan Mineral Dan Batu Bara

PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Soemarto, C.D. 1987. Hidrologi Teknik. Surabaya: Usaha Nasional.

Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 2019. Dasar-Dasar Manajemen, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

VOL. 02, NO. 02, 2025
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

TENTANG PENULIS

Indra Gumilang